

Ringkasan Eksekutif

Peran Aktor Lokal dalam Kerjasama Internasional

Hubungan antara bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan hubungan internasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang memiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi warga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama internasional juga menjadi otoritas atau hak negara.

Tidak heran bila dalam sejarah perkembangan hubungan internasional, teori-teori yang menjelaskan pola, model, perilaku serta sistem yang terjadi selalui dihubungkan dengan kemampuan sebuah negara. Walaupun dalam praiktiknya, peran-peran aktor di luar negara semakin berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia, akan tetapi aktor non negara tersebut bertindak selalu atas pengetahuan dan kontrol negara melalui berbagai produk perundang-undangan dan aturan lainnya.

Belakangan ini peran negara belakangan cenderung berbagi dengan aktor-aktor non Negara, termasuk di tingkat lokal. Aktor negara selain memberikan peluang kepada aktor bukan negara untuk terlibat aktif, juga karena peran-peran yang diberikan tersebut juga akan mendukung spirit kerjasama antarbangsa yang selama ini dijalankan negara. Dengan demikian, adanya desentralisasi peran ini akan memudahkan dan meringankan pekerjaan negara yang semakin kompleks. Aktor-aktor non negara yang diakui dalam percaturan politik internasional seperti organisasi internasional, individu, perusahaan multi nasional, kelompok pemberontak, dan lembaga swadaya masyarakat, kini juga merambah kepada aktor-aktor lokal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta daerah.

Respon terhadap perkembangan global ini juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberikan porsi peranan kepada aktor-aktor lokal tersebut. Pemerintah daerah baik di provinsi serta kota dan kabupaten telah diberikan kewenangan untuk menjalin kerjasama

dengan pihak asing. Demikian pula dengan perguruan tinggi, diberikan otoritas untuk meningkatkan kapasitasnya dalam dunia global dengan kerjasama antar universitas. Hal serupa terjadi pada pengusaha lokal, walaupun hakekatnya pihak swasta tidak terikat kuat dalam regulasi pemerintah, kecuali pada aspek-aspek yang fundamental. Pada dimensi lain pada hakekatnya telah terjalin hubungan saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.

Otonomi daerah yang telah berjalan pasca reformasi tahun 1998 telah mendorong percepatan peran aktor-aktor non negara tersebut. Seiring dengan itu berbagai peluang hubungan antar lembaga antarbangsa juga semakin berkembang setelah diinisiasi oleh kelompok individu/bisnis, perusahaan dan perguruan tinggi. Sejatinya peran tiga aktor ini akan semakin mempererat kerjasama antara negara dalam meningkatkan perdamaian dunia yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Penelitian ini ditulis melibatkan sepuluh dosen, juga melibatkan tiga orang mahasiswa HIMPUNAN Internasional, Padi Aulliamotrizal, Ahmad Rizka Putra, dan Novandri Satria. Ketiga mahasiswa tersebut ikut aktif dalam proses bimbingan tugas akhir Ahmad Jansari. Untuk itu, tim penyusun mengucapkan terimakasih atas partisipasi aktif ketiga mahasiswa ini dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi pembaca yang berminat dengan kajian hubungan internasional.

Pekalongan, Desember 2012.

Tim Penyusun